

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejarah pendidikan maritim di Hindia Belanda merupakan bagian penting dalam perkembangan kebijakan kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi. Pada awal abad ke-20, kemajuan teknologi pelayaran, terutama dengan hadirnya kapal uap, membawa perubahan signifikan dalam dunia maritim. Perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang didirikan pada tahun 1888 memainkan peran utama dalam memperkuat jalur perdagangan antar-pulau di Hindia Belanda.<sup>1</sup> Namun, meskipun industri pelayaran berkembang pesat, tenaga kerja yang tersedia masih didominasi oleh orang Eropa. Keterbatasan jumlah pelaut Eropa serta biaya operasional yang semakin tinggi menjadi tantangan utama bagi Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Hindia Belanda (*Koninklijke Marine*).<sup>2</sup>

Perang Dunia I memperburuk kondisi ini. Sebagai negara yang menetapkan kebijakan netral, Belanda tetap mengalami dampak dari konflik global ini, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan.<sup>3</sup> Krisis tenaga kerja maritim mulai terasa akibat meningkatnya ketegangan di Eropa, yang menyebabkan keterbatasan tenaga

---

<sup>1</sup> Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 97-101.

<sup>2</sup> Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918* (Leiden: KITLV Press, 2007), hlm. 91.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

pelaut Eropa di Hindia Belanda<sup>4</sup>. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial mulai mempertimbangkan penggunaan tenaga pribumi dalam industri maritim, termasuk di dalam armada laut Belanda. Namun, langkah ini memicu perdebatan di *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda), terutama terkait dengan kesiapan dan loyalitas pelaut pribumi dalam menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks di kapal modern.<sup>5</sup>

Di tengah kondisi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mendirikan lembaga pendidikan maritim yang dapat melatih tenaga kerja pribumi agar siap berpartisipasi dalam armada kolonial. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah kolonial mendirikan *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar pada tahun 1915. Sekolah ini bertujuan untuk mendidik dan melatih pelaut pribumi agar dapat mengisi posisi dalam armada Hindia Belanda. Pemilihan Makassar sebagai lokasi sekolah bukan tanpa alasan. Kota ini telah lama menjadi pusat kegiatan maritim di wilayah timur Hindia Belanda dan memiliki akses yang strategis terhadap jalur pelayaran utama.

Pelatihan untuk para pelaut pribumi dilakukan di *Batavia* (yang sekarang menjadi Jakarta) dan dilaksanakan langsung di atas kapal. Namun, untuk pendidikan yang lebih terstruktur, dibangun *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen te Makassar* di *Strandweg* (sekarang Jalan Rajawali), dimana para siswa belajar

---

<sup>4</sup> *Nieuwsblad van het Noorden*, Tweede Kamer, (Groningen : 25 Juni 1914) ,hlm 1.

<sup>5</sup> *Jaarboek van de Koninklijke Marine*, 1916, hlm. 184.

membaca, menulis, berhitung, serta memperdalam pengetahuan tentang geografi Hindia Belanda.

Pelatihan awal dilakukan di atas kapal, dan belum memiliki bangunan fisik sejak didirikannya pada bulan Oktober 1915. Selama periode pelatihan awal, terbentuk dua kelas. Salah satunya terdiri dari kelasi-kelasi (*matrozen*) yang berasal dari kapal-kapal, sementara yang lainnya adalah pelaut muda (*licht-matrozen*) yang baru direkrut dari *Menado* (Manado) dan *Amboina* (Ambon).

Pada tahun 1916, pelatihan pelayaran berlangsung dengan dua tahap. Tahap pertama berlangsung hingga tanggal 11 Mei 1916 di atas kapal Ms. "Mataram" dan kemudian dilanjutkan di sekolah pelatihan pelaut pribumi atau *Kweekschool* di Makassar. Namun, karena masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan terhadap bangunan dan fasilitas di *Kweekschool* Makassar, pelatihan baru dapat dimulai pada bulan Juni 1916. Pada tanggal 14 Agustus 1916, seorang guru pribumi tingkat dua mulai dipekerjakan di sekolah tersebut. Pelatihan di *Kweekschool* terbagi menjadi tiga divisi atau kelas, yaitu: Pelatihan petugas sinyal (*seiner-opleiding*), Kelasi kelas 3 (yang berasal dari angkatan Oktober 1915), Kelasi muda (yang masuk pada bulan April 1916).<sup>6</sup>

Pada tahun 1921, sekolah ini mengalami perkembangan signifikan dengan dibangunnya gedung baru yang lebih modern untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Pemindahan lokasi sekolah ke *Laijangweg* (sekarang Jalan Layang) menjadi

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 184.

salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas pelatihan.

Pada tahun 1926, kepemimpinan sekolah ini dipegang oleh Letnan Laut F.A. Buddingh, yang dibantu oleh tim pelatih militer yang terdiri dari 7 perwira dan 25 bintara. Di samping itu, untuk pendidikan dalam Bahasa Belanda, matematika, dan geografi, terdapat 2 guru Belanda dan 3 guru pribumi yang bertanggung jawab. Penting untuk dicatat bahwa murid-murid yang diterima di sekolah ini diwajibkan memiliki pemahaman tentang Bahasa Belanda, karena sebagian besar materi pelajaran diajarkan dalam Bahasa Belanda. Selain itu, Bahasa Belanda juga digunakan selama praktik di kapal, sehingga pemahaman yang baik terhadap bahasa tersebut menjadi sangat penting bagi para siswa.<sup>7</sup>

Pada tahun 1927, *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen di Makassar* tetap dipimpin oleh Kapten Laut F.A. Buddingh, dengan 8 perwira dan 31 bintara. Pelajaran Bahasa Belanda, berhitung, dan geografi diajarkan oleh 2 guru Belanda dan 3 guru pribumi. Jumlah siswa pada 1 Januari 1927 adalah 245, terdiri dari 124 kelasi dan 121 juru api, dengan distribusi etnis beragam. Kemudian, Pada 1 Mei 1927, dibuka kelas baru dengan 185 siswa. Pada akhir Desember 1927, jumlah total siswa mencapai 206, terdiri dari 134 kelasi dan 72 juru api, dengan etnis dan agama yang beragam.

---

<sup>7</sup> Sarkawi Husain, *Sejarah Sekolah Makassar (Ditengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elit Baru 1876-1942)*, (Makassar: Innawa, 2015), hlm. 84.

Keberadaan sekolah ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya penguasaan bahasa Belanda di kalangan siswa pribumi. Karena sebagian besar materi pelajaran dan komunikasi di kapal dilakukan dalam bahasa Belanda, siswa yang tidak memiliki kemampuan bahasa yang cukup sering menghadapi kesulitan dalam memahami instruksi dan teori yang diajarkan. Selain itu, banyaknya stereotip negatif dari pihak kolonial terhadap kapasitas dan loyalitas pribumi juga menjadi faktor yang memperlambat perkembangan sekolah ini. Pemerintah kolonial masih meragukan apakah pelaut pribumi mampu menjalankan tugas-tugas penting dalam operasi maritim.

Situasi semakin kompleks pada awal 1930-an dengan munculnya krisis ekonomi global yang berdampak besar pada Hindia Belanda. Ketegangan sosial-politik pun meningkat. Gerakan perlawanan terhadap sistem kolonial mulai muncul, termasuk di sektor maritim. Puncaknya terjadi pada tahun 1933 dengan adanya pemberontakan *De Zeven Provinciën*, yang melibatkan para pelaut pribumi dalam aksi protes terhadap perlakuan tidak adil di kapal Belanda.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pemberontakan di atas kapal *De Zeven Provinciën* terjadi pada 5 Februari 1933, ketika kapal tersebut berada di lepas pantai Sumatera. Pemberontakan ini disebabkan oleh penurunan gaji semua pegawai pemerintah sebesar 17% yang diumumkan 1 Januari. Penurunan tersebut merupakan bagian dari usaha-usaha pemerintah untuk memperkecil jurang antara pendapatan dan pengeluaran ketika depresi ekonomi telah menyebabkan pendapatan pemerintahan menurun secara gawat. Untuk lebih jelas lihat John Ingleson, 1983, *Jalan ke Pengasingan : Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 230-234.

*Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* dianggap sebagai institusi yang berpotensi menjadi pusat gerakan sosial di kalangan pelaut pribumi. Karena itu, pemerintah kolonial memutuskan untuk menutup sekolah ini pada tahun yang sama. Penutupan ini mencerminkan kekhawatiran Belanda terhadap potensi perlawanan yang lebih gencar dari para pemuda melalui pendidikan. Setelah ditutup, bangunan sekolah tersebut dialihfungsikan menjadi asrama bagi serdadu Belanda.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah pendirian, perkembangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan penutupan *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar pada periode 1915-1933. Dengan memahami dinamika institusi ini dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam studi sejarah pendidikan maritim serta kebijakan kolonial Belanda terhadap tenaga kerja pribumi di Hindia Belanda.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pendirian sekolah pelayaran di Makassar bermula dari dorongan untuk mengawaki kapal-kapal kecil dengan menggunakan tenaga pribumi. Maka dari itu untuk melihat lebih dalam sejarah sekolah pelayaran di Makassar, penelitian ini merumuskan beberapa masalah, diantaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar*?

2. Apa faktor-faktor penyebab penutupan *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar* pada Tahun 1933?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulis telah melakukan dua jenis pembatasan dalam penelitian ini, yaitu pembatasan temporal, pembatasan spasial dan pembatasan tematik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengarahkan fokus penelitian sehingga rumusan masalah dapat dijawab dengan lebih terinci. Batasan temporal dalam penelitian ini adalah rentang waktu antara tahun 1915 hingga 1933. Keputusan ini didasarkan pada tahun 1915 sebagai awal berdirinya *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar, sementara tahun 1933 menjadi batas temporal akhir karena pada tahun tersebut sekolah tersebut ditutup dan digunakan sebagai asrama serdadu Belanda.

Sementara itu, pembatasan spasial mengkaji perkembangan *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen* berlokasi di Makassar. Keputusan ini diambil untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah sekolah tersebut di konteks wilayah Makassar. Batasan tematik penelitian ini akan difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang terkait dengan sejarah "*Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen te Makassar*". Tema penelitian ini akan dibatasi pada tiga dimensi utama: pendirian sekolah, perkembangan pada tahun 1921-1933 beserta hambatannya, dan penutupan sekolah pada tahun 1933. Fokusnya juga akan ditekankan pada keputusan strategis yang melibatkan pendidikan maritim untuk pelaut pribumi di Makassar selama masa kolonial. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas aspek-

aspek sejarah lainnya yang tidak langsung terkait dengan pendirian, pemindahan, dan penutupan sekolah tersebut.

Batasan ini bertujuan untuk menjaga fokus penelitian agar lebih terarah dan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap peristiwa dan kebijakan yang berkaitan dengan institusi pendidikan maritim tersebut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Setelah menentukan rumusan dan batasan masalah terkait yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang berdirinya *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar*.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penutupan *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar* pada tahun 1933.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian sejarah pendidikan maritim di Hindia Belanda, khususnya mengenai *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam memahami kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan pelayaran bagi pribumi serta dampaknya terhadap perkembangan tenaga pelaut di Nusantara.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis mengenai sekolah Sekolah Pelatihan Awak Kapal untuk Pribumi di Makassar yang sekarang menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru mengenai latar belakang berdirinya. Sekolah Pelatihan Awak Kapal untuk Pribumi di Makassar terlebih faktor yang menyebabkan Sekolah ini sempat ditutup pada tahun 1933.

### 1.6. Tinjauan Pustaka

#### 1.6.1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai sejarah pendidikan dan pelayaran di Hindia Belanda telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa di antaranya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah buku "*Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*" oleh Intan Densi Kamar, dkk., yang membahas perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, termasuk sistem pendidikan tradisional, pendidikan pada awal abad ke-20 hingga 1945, serta pendidikan pasca-kemerdekaan.<sup>9</sup>

Buku ini menyoroti bagaimana sistem pendidikan Barat mulai masuk ke Sulawesi Selatan pada tahun 1876 melalui pendirian *Kweekschool* oleh Benjamin Frederik Matthes di Makassar. Buku ini juga membahas OSVIA yang mempersiapkan

---

<sup>9</sup> Sarita Pawiloy, Intan Densi Kamar, A. Rauf Rahim, Basri Padulungi, dan Rabihatun Idris, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981).

calon pegawai pemerintahan pribumi. Relevansi buku ini dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang *Kweekschool* sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pendidikan kejuruan bagi pribumi. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih fokus pada *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* sebagai sekolah pelatihan maritim bagi pelaut pribumi di Makassar.

Buku "*Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*" oleh Adrian B. Lopian menyoroti sejarah pelayaran dan perdagangan di Nusantara setelah transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam.<sup>10</sup> Pembahasannya mencakup sistem angin untuk pelayaran, jalur dan pusat perdagangan, serta sistem pemungutan bea cukai. Relevansi buku ini terhadap penelitian ini terletak pada pembahasan jalur pelayaran dan pusat perdagangan di Nusantara, yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja pelaut pribumi. Namun, buku ini tidak membahas secara spesifik tentang pendidikan maritim, sehingga penelitian saya mengisi celah dalam kajian ini dengan fokus pada pelatihan pelaut pribumi di *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen*.

Buku yang berjudul "*Sejarah Sekolah Makassar: di tengah kolonialisme pertumbuhan pers, dan pembentukan elite baru, periode 1876-1942*" oleh Sarkawi pada tahun 2015 yang membahas tentang sekolah yang ada di Makassar periode 1876-1942.<sup>11</sup> Dalam tulisan ini juga menyinggung tentang sekolah pelayaran yang disebut *Zeevaartschool*, di pembahasannya mencakup tentang letak sekolah, fasilitas

---

<sup>10</sup> Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).

<sup>11</sup> Sarkawi Husain (2015), *Sejarah Sekolah Makassar*.

bangunan, jumlah siswa dan pelajaran yang diajarkan. Tulisan ini mencakup informasi tentang sekolah yang akan diteliti. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tidak disebutkan mengapa perpindahan tempat dan faktor penutupan secara detail.

Jurnal "*Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930)*" oleh Muhammad Fakhriansyah dan Intan Ranti Permatasari Patoni menjelaskan dinamika akses pendidikan pribumi selama berlangsungnya Politik Etis di Hindia Belanda.<sup>12</sup> Ditekankan bahwa kebijakan pendidikan yang diberikan kepada pribumi lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi kolonial daripada untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi. Relevansi jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajiannya tentang keterbatasan akses pendidikan bagi pribumi, yang juga berlaku dalam konteks pendidikan maritim. Namun, penelitian saya lebih menyoroti bagaimana pelaut pribumi dilatih di *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* dan bagaimana pendidikan ini memengaruhi posisi mereka dalam sistem kolonial.

Pemilihan fokus penelitian pada sejarah pendidikan pribumi di bidang pelayaran di Makassar merupakan langkah yang sangat relevan dan menarik serta memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dalam perkembangan pendidikan maritim

---

<sup>12</sup> Muhammad Fakhriansyah and Intan Ranti Permatasari Patoni, "Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930)," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2021): 183-193.  
Doi:<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jps/article/view/12528/8078>

di Makassar, serta peran kunci yang dimainkan oleh pendidikan ini dalam konteks sejarah maritim dan perkembangan masyarakat setempat.

### **1.6.2. Landasan Konseptual**

#### **A. Sekolah Pelatihan (sekolah kejuruan)**

Menurut Sarkawi, dalam bukunya yang berjudul “*Sejarah Sekolah Makassar: di tengah kolonialisme pertumbuhan pers, dan pembentukan elite baru, periode 1876-1942*”. Sekolah pelatihan awak kapal pribumi merupakan sekolah kejuruan yang masuk dalam *Zeevaartschool*. *Zeevaartschool* sendiri adalah merupakan sebuah pendidikan kejuruan Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang akan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sekolah pada masa kolonial ini mengharuskan penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, serta menyalurkan pengetahuan barat kedalam kurikulum sekolah. Lulusan dari sekolah ini diharapkan dapat berperan sebagai pelaut terampil, ahli dalam pertukangan, dan opsir rendah yang berguna untuk armada laut Hindia Belanda.

#### **B. Awak Kapal**

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. 14 Awak kapal (ABK) merupakan semua orang yang bekerja di kapal, bertugas mengoperasikan dan memelihara, serta menjaga kapal dan muatannya. Awak terdiri dari beberapa bagian, dan memiliki tugas dan tanggung jawab

masing-masing, awak kapal bertanggung jawab pada petugas kapal terhadap departemennya masing-masing. Pimpinan tertinggi untuk deck departement adalah mualim 1 dan bertanggung jawab kepada Nahkoda, namun sebagian besar ABK di atas kapal tidak mengetahui tugasnya masing-masing. Berdasarkan data kementerian perhubungan pada 7 Juni 2020, Indonesia menempati urutan ke-2 dunia dengan 1.172.508 pelaut dan menyumbang sekitar 16 Triliun devisa pelaut untuk Negara.<sup>13</sup>

### C. Pribumi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*pribumi*" diartikan sebagai orang asli atau penduduk asli suatu daerah, yang berbeda dengan pendatang atau penduduk yang berasal dari luar daerah tersebut. Dalam konteks Indonesia, pribumi merujuk pada penduduk asli yang telah mendiami wilayah nusantara sebelum kedatangan bangsa asing, terutama Belanda, yang kemudian menjajah Indonesia.

Dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, M.C. Ricklefs menggambarkan bagaimana kolonialisme Belanda membentuk struktur sosial yang sangat memisahkan golongan pribumi dan golongan non-pribumi. Pribumi, yang merupakan penduduk asli Indonesia, ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan dan dihadapkan pada pembatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan posisi kekuasaan.<sup>14</sup> Di sisi lain, golongan Eropa dan Tionghoa lebih mendominasi sektor-sektor ekonomi dan politik,

---

<sup>13</sup> Ivan Potto, Sudjanadi Tjipto Sudarmo, Sri Handayani, Yana Tatiana, Prasadja Ricardianto, "*Analisis Sertifikasi Pelaut, Keterampilan, dan Kesejahteraan Awak Kapal Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kinerja Operasional Kapal*", Vol.24, Jurnal penelitian Transportasi Laut, 2022, hlm. 33-40.

<sup>14</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 142-145.

memperkuat ketidaksetaraan sosial yang ada. Sistem ini tidak hanya mengisolasi pribumi secara sosial, tetapi juga membatasi mobilitas mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Kebijakan kolonial ini, yang disebut dengan *apartheid* sosial, menyebabkan ketidaksetaraan yang mendalam antara golongan pribumi dan non-pribumi di Indonesia.

### **1.7. Metode Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima bagian yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber/verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah.

#### **1. Pemilihan Topik**

Dalam pemilihan topik yang merupakan langkah awal dalam penulisan harus yang berkaitan dengan topik sejarah. Dengan ditemukannya topik maka penulis dapat menetapkan batasan spasial dan temporal yang akan diteliti. Penentuan topik dilakukan dengan studi literatur untuk mempermudah peneliti dalam penulisan serta memperoleh sumber yang dibutuhkan.

Pemilihan topik dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap sejarah maritim dan pendidikan pelayaran bagi pribumi di Hindia Belanda. *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar dipilih karena merupakan institusi pendidikan pelayaran pribumi pertama yang beroperasi pada masa kolonial. Fokus penelitian ini adalah mengkaji latar belakang pendirian

sekolah, perkembangan sistem pendidikannya, serta faktor yang menyebabkan penutupannya pada tahun 1933.

## 2. Pengumpulan Sumber

Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis penelitian sejarah yang akan ditulis/diteliti. Karena penelitian ini bertemakan penelitian historikal dimana bentuk penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan fakta dan menarik kesimpulan atas kejadian masa lalu, maka penulis mencari sumber dan data melalui arsip dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan topik penulis.

Penulis di tahap ini banyak mendapatkan sumber primer berupa arsip koran sebagai sumber berita maupun peristiwa, *Jaarboek van de Koninklijke Marine* dan *Marineblad* yang menggambarkan situasi dan ketegangan yang terjadi, semua ini diperoleh dari situs online *Delper* sebagai penunjang dari jawaban rumusan masalah penelitian, arsip foto di peroleh dari *Leiden University Libraries Digital Collection*, dan *Nationaal Archief* penyedia arsip serta sumber lainnya berupa buku, jurnal, dan majalah versi digital yang berkaitan dengan sekolah pelayaran pribumi di Makassar 1915-1933 yang diakses secara online.

## 3. Kritik Sumber

Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap keabsahan sumber dengan dua jenis kritik: eksternal dan internal. Kritik eksternal melibatkan penilaian keaslian dan validitas sumber, sementara kritik internal bertujuan menguji kredibilitas melalui perbandingan data antar-sumber. Proses ini penting untuk menyaring

informasi yang diperoleh agar dapat diandalkan dalam penyusunan interpretasi dan penulisan sejarah..

#### 4. Interpretasi

Pada tahap ini, sumber-sumber yang telah diuji validitasnya dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi keberadaan *Kweekschool*. Analisis ini mencakup bagaimana kebijakan kolonial Belanda dalam pendidikan maritim, sistem perekrutan dan pelatihan pelaut pribumi, serta peran *Kweekschool* dalam struktur angkatan laut Hindia Belanda. Selain itu, penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan sekolah ini akhirnya ditutup pada tahun 1933, termasuk dampaknya terhadap masyarakat pribumi dan pendidikan maritim selanjutnya.

#### 5. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, di mana fakta-fakta hasil penelitian disusun secara terstruktur dan dijelaskan dalam narasi sejarah yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini berfokus pada sejarah maritim berlatar belakang institusi pendidikan di Makassar. Sehingga dalam penulisannya, menyajikan sumber-sumber baik primer ataupun sekunder yang membahas *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar* pada tahun 1915-1933.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penyusunan penelitian ini, untuk lebih sistematis dalam memberikan gambaran tentang “*Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te*

*Makassar* di tahun 1915-1933”, maka dibuat sistematika penulisan dalam komposisi lima bab yang merupakan pokok-pokok uraian dalam skripsi ini, maka pembahasannya disusun sebagai berikut:

**BAB I** , berisi pendahuluan sebagai pengantar bab-bab selanjutnya. Pada bab ini berisi sub latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini akan membahas tentang Belanda dan Hindia-Belanda pada perang dunia pertama.

**BAB III**, dalam bab ini, akan membahas tentang beberapa perdebatan hingga terbentuknya *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar*

**BAB IV**, pada bab ini membahas mengenai perkembangan *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar* dari tahun 1921-1933, serta peristiwa sebelum penutupannya.

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir yang akan mengungkap kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

## **BAB II :**

### **DI TENGAH PERANG DUNIA PERTAMA**

#### **2.1 Belanda di Tengah Perang Dunia Pertama**

Beberapa dekade sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama ditandai oleh puncak era imperialisme. Kekuatan besar Eropa berlomba memperluas kekuasaan kolonial mereka, yang memicu persaingan sengit. Situasi ini diperkuat oleh perkembangan pesat jaringan kereta api dan peralihan dari kapal layar ke kapal uap yang lebih efisien, yang mendukung lonjakan perdagangan internasional. Perubahan ini membawa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Belanda.<sup>15</sup>

Pada awal abad ke-20, Eropa berada dalam kondisi yang sangat menegangkan. Ketegangan antar negara-negara besar, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Rusia, semakin meningkat akibat persaingan kolonial, perlombaan senjata, dan aliansi yang rumit. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, banyak negara terjebak dalam konflik yang berkepanjangan, mengakibatkan keruntuhan ekonomi dan sosial di berbagai belahan Eropa. Pertikaian ini bukan hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang melanda kawasan sekitarnya. Dalam situasi yang kacau ini, Belanda memilih untuk menjaga posisi netral.

Keputusan Belanda untuk tetap netral dalam Perang Dunia I merupakan salah satu studi penting dalam hukum internasional dan diplomasi. Sebagai negara kecil

---

<sup>15</sup> Paul Moeyes, *Buiten Schot: Nederland tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918*, (Amsterdam: Arbeiderspers, 2005), hlm. 161.

dengan posisi geografis strategis, Belanda menghadapi tantangan besar karena hubungan ekonominya yang erat dengan negara-negara yang bertikai serta tradisi panjang dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, netralitas Belanda tidak hanya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari keterlibatan dalam perang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kompleks, seperti ancaman terhadap kepentingan ekonomi dan geopolitik negara tersebut. Netralitas Belanda selama Perang Dunia I dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik geografis, ekonomi, maupun tradisi hukum internasional yang kuat.

Secara geografis, posisi Belanda yang terletak di tengah Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Jerman dan hanya dipisahkan oleh selat dari Inggris, memberikan ancaman besar terhadap keputusan politik negara ini. Jika Belanda memilih mendukung salah satu pihak, negara ini berisiko menghadapi invasi atau blokade dari pihak lain.<sup>16</sup> Oleh karena itu, menjaga netralitas menjadi pilihan paling aman untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik besar ini.

Dari segi ekonomi, Belanda memiliki keterbatasan sumber daya alam, yang membuatnya sangat bergantung pada impor dari kedua pihak yang terlibat dalam perang. Hubungan ekonomi yang erat dengan Jerman dan peran penting Belanda sebagai jalur perdagangan internasional, termasuk dengan wilayah kolonialnya,

---

<sup>16</sup> Amry Vandenbosch, *The Neutrality of the Netherlands During the World War* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1927), hlm. 3-5.

menambah kompleksitas situasi ini. Netralitas memungkinkan Belanda untuk mempertahankan akses ke pasar dan jalur perdagangan tanpa terjebak dalam perang yang merusak ekonomi, meskipun kedua belah pihak berusaha mempengaruhi kebijakan Belanda untuk mendukung mereka.

Selain itu, tradisi hukum internasional Belanda yang panjang, dimulai dengan tokoh terkemuka seperti Hugo Grotius, juga berperan besar dalam keputusan untuk tetap netral.<sup>17</sup> Belanda telah lama menjadi pusat diplomasi internasional dan pengembangan hukum perang, dengan Den Haag sebagai tempat berdirinya berbagai lembaga internasional. Oleh karena itu, netralitas Belanda tidak hanya dilihat sebagai keputusan politik, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen negara ini terhadap perdamaian dunia dan prinsip-prinsip hukum internasional, yang menjadikannya salah satu negara yang paling berperan dalam memelihara stabilitas global selama Perang Dunia I.<sup>18</sup>

Namun, mempertahankan netralitas tidaklah tanpa tantangan. Posisi geografis Belanda yang berbatasan langsung dengan Jerman dan dekat dengan Inggris

---

<sup>17</sup> Hugo Grotius (1583–1645) adalah seorang filsuf, teolog, dan ahli hukum asal Belanda yang dikenal sebagai "Bapak Hukum Internasional." Ia memainkan peran penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, terutama dalam hal perang dan perdamaian antarnegara. Karyanya yang paling terkenal adalah *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Perdamaian), yang diterbitkan pada tahun 1625. Pemikirannya memberikan dasar bagi perumusan perjanjian internasional dan menjadi referensi penting bagi perkembangan diplomasi dan hukum internasional.

<sup>18</sup> Vandenbosch, (1927), hlm. 3-5.

menjadikannya jalur penting bagi perdagangan dan transportasi. Situasi ini memaksa Belanda untuk memperketat regulasi wilayahnya agar tidak digunakan oleh negara-negara yang berperang. Pemerintah Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan, seperti membatasi transit material melalui wilayahnya dan memberlakukan aturan ketat untuk kapal perang asing yang memasuki pelabuhan Belanda. Kapal-kapal tersebut hanya diizinkan tinggal selama 24 jam, kecuali dalam keadaan darurat. Untuk mendukung posisi netral, Belanda harus mengambil langkah-langkah yang mempengaruhi kebijakan militer dan ekonominya.<sup>19</sup>

Krisis militer pertama muncul pada Juli 1914, ketika mobilisasi penuh angkatan bersenjata Belanda dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar. Mobilisasi ini melibatkan lebih dari 200.000 tentara dalam waktu tiga hari, menjadikannya salah satu mobilisasi tercepat di Eropa. Letnan Jenderal Cornelis Jacobus Snijders memimpin persiapan ini dengan strategi yang mengedepankan kemampuan bertahan dan pengendalian penuh wilayah strategis di selatan dan barat. Mobilisasi penuh dilaksanakan pada awal Agustus 1914, menjadikan Belanda salah satu negara netral pertama yang memobilisasi angkatan bersenjatanya. Dalam strategi pertahanannya, Snijders memprioritaskan penguatan pasukan di provinsi selatan untuk

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 15-20.

menghalangi kemungkinan pelanggaran netralitas oleh Jerman, yang merencanakan jalur invasi ke Prancis melalui Belgia.<sup>20</sup>

Tantangan besar kemudian muncul dalam bentuk tekanan eksternal dari kedua belah pihak yang bertikai. Inggris, melalui blokade lautnya, mempersulit Belanda untuk mempertahankan perdagangan netral dengan Jerman. Sementara itu, Jerman menuntut akses ke jalur transportasi sungai Belanda, termasuk Sungai Rhine, untuk mengangkut material perang ke Belgia. Ketegangan ini memaksa pemerintah Belanda untuk melakukan manuver diplomatik yang hati-hati demi menghindari pelanggaran netralitas. Informasi palsu tentang ancaman invasi Inggris di Zeeland memicu kesiapan militer yang intensif.<sup>21</sup>

Selain tantangan militer, Netralitas juga berdampak besar pada kebijakan ekonomi Belanda. Blokade maritim Inggris menghambat perdagangan internasional, menyebabkan kelangkaan bahan baku dan lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pemerintah Belanda merespons dengan sistem distribusi dan kontrol harga untuk mengatasi inflasi dan krisis pangan. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya meredakan keresahan sosial akibat tekanan ekonomi yang signifikan.

---

<sup>20</sup> Klinkert, W. (2017). *Military and Strategy (The Netherlands)*. Dalam U. Daniel et al. (Ed.), *1914-1918 Online: International Encyclopedia of the First World War*. Freie Universität Berlin. Diakses dari <https://doi.org/10.15463/ie1418.11075>. hlm 4-5.

<sup>21</sup> Kruizinga, S., Moeyes, P., & Klinkert, W. (2014). *The Netherlands*. Dalam U. Daniel et al. (Ed.), *1914-1918 Online: International Encyclopedia of the First World War*. Freie Universität Berlin. Diakses dari <https://doi.org/10.15463/ie1418.10432>. hlm 17.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Belanda mendirikan "*Netherlands Oversea Trust Company*" (NOTC), sebuah lembaga yang bertujuan mengatur perdagangan dengan pihak-pihak yang bertikai, sambil memastikan bahwa ekspor Belanda tidak secara langsung mendukung upaya perang. Kebijakan ini membantu mengurangi tekanan dari blokade laut Inggris, tetapi juga memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari tuduhan keberpihakan dari kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Belanda harus menangani lonjakan pengungsi dari Belgia, yang melarikan diri dari invasi Jerman pada awal perang. Belgia sendiri, yang awalnya dinyatakan netral dan status netralitasnya dijamin oleh perjanjian internasional, kemudian pada 4 Agustus 1914, netralitas Belgia dilanggar oleh Jerman. Jerman menginvasi Belgia sebagai bagian dari rencana serangan cepat ke Prancis melalui wilayah Belgia. Invasi ini kemudian memicu Inggris untuk masuk ke dalam perang, karena mereka memiliki kewajiban untuk melindungi netralitas Belgia berdasarkan perjanjian sebelumnya.<sup>23</sup>

Dalam situasi ini, Belanda merasa terjebak. Di satu sisi memiliki hubungan yang baik terhadap Belgia dan di sisi lain jika membantu Belgia maka akan ikut dalam konflik antara Inggris dan Jerman. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk. Jadi, Belanda tidak ingin mengorbankan netralitasnya demi Belgia, terutama karena kemungkinan Belanda diserang tampak kecil. Netralitas telah menjadi bagian penting

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>23</sup> Marvin Perry, *Peradaban Barat, Dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global*. (Bantul: Kreasi Wacana. 2013), hlm. 264.

dari kebijakan luar negeri dan identitas nasional Belanda, dipandang sebagai cara terbaik untuk menjaga keamanan, ekonomi, serta stabilitas di dalam negeri dan di wilayah koloninya. Ketergantungan pada perdagangan dengan kedua negara yang berperang membuat posisi Belanda semakin sulit.<sup>24</sup>

Meskipun Belanda tidak terlibat langsung dalam pertempuran selama Perang Dunia pertama dan hanya mempertahankan pasukan untuk tujuan defensif, negara ini tetap mengalami dampak perang, terutama dalam bentuk korban sipil. Kelompok yang paling terdampak adalah para nelayan, yang kehilangan mata pencaharian atau nyawa akibat ranjau laut di perairan Belanda. Selain itu, angkatan laut niaga juga menderita, terutama setelah Jerman memulai perang kapal selam tanpa batas pada tahun 1915. Dua kapal Belanda, SS *Medes* dan SS *Katwijk*, menjadi korban tenggelam oleh kapal selam Jerman pada Maret dan April 1915. Kehilangan kapal dagang ini terus berlanjut hingga akhir perang, menyebabkan kerugian besar bagi Belanda.<sup>25</sup>

Meskipun posisi netral Belanda berhasil menjaga wilayah Eropa dari invasi langsung selama Perang Dunia Pertama, dampaknya tidak hanya dirasakan di daratan utama. Kebijakan dan kondisi perang juga membawa implikasi besar bagi wilayah kolonial Belanda, termasuk Hindia Belanda. Sebagai salah satu koloni yang memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi dan logistik Belanda, Hindia Belanda menghadapi tantangan tersendiri. Pada Subbab berikutnya, akan dibahas bagaimana

---

<sup>24</sup> Susanne Wolf, *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

perang memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Hindia Belanda serta langkah-langkah yang diambil pemerintah kolonial untuk mempertahankan stabilitas di wilayah tersebut.

## **2.2. Hindia Belanda dalam Perang Dunia Pertama**

Pada awal abad ke-20, modernisasi armada dagang Belanda membawa dampak besar bagi Hindia Belanda. Kapal layar hampir sepenuhnya digantikan oleh kapal uap yang lebih andal, cepat, dan ekonomis. Kapasitas rata-rata sekitar lima ratus kapal uap Belanda mencapai tujuh belas ribu ton, jauh lebih besar dibandingkan kapal layar yang hanya sekitar empat hingga lima ribu ton. Armada dagang ini pun menjadi semakin penting bagi perekonomian Belanda. Pada tahun 1913, dari total 27,7 juta ton kapal yang melewati Terusan Suez, Inggris memiliki 16,5 juta ton, Jerman 4,6 juta ton, Belanda 1,7 juta ton, dan Prancis 1,4 juta ton.<sup>26</sup>

Peran ini semakin signifikan sejak diperkenalkannya kapal uap dan berdirinya perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) pada 4 September 1888 di Amsterdam, Belanda yang membawa perubahan besar serta kemajuan dalam pelayaran antar pulau di Indonesia selama masa Hindia Belanda, terutama di wilayah timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Paul Moeyes (2005), hlm. 180.

<sup>27</sup> Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 101.

Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada bulan Agustus 1914, Hindia Belanda, sebagai bagian dari Kerajaan Belanda yang bersikap netral, memasuki masa penuh ketidakpastian. Perang ini menjadi tantangan global yang berdampak luas pada kehidupan ekonomi, sosial, dan militer di Hindia Belanda. Meski tidak secara langsung terlibat dalam konflik, koloni ini terhubung erat dengan dinamika global yang mempengaruhi kebijakan kolonial dan kehidupan masyarakat pribumi. Pada awalnya, perang menawarkan beberapa peluang bagi pengusaha lokal dengan meningkatnya permintaan untuk komoditas seperti karet dan timah. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik global ini justru memicu kelangkaan barang-barang impor, seperti bahan pangan dan barang kebutuhan sehari-hari, yang berdampak pada naiknya harga dan menekan daya beli masyarakat.<sup>28</sup>

Pada awal perang, Hindia Belanda tampaknya tidak terlalu terguncang. Ekspor komoditas utama seperti gula, kopi, dan karet tetap berjalan lancar karena pasar baru, seperti Amerika Serikat dan Jepang, menggantikan pasar Eropa yang terganggu oleh konflik. Stabilitas ini memberi rasa aman semu bagi pemerintah kolonial, yang mengandalkan netralitas Belanda untuk menjaga jarak dari konflik langsung. Namun, di balik ketenangan ini, ancaman besar mulai muncul, terutama dari Jepang yang bersekutu dengan Inggris, Prancis, dan Rusia dalam Blok Sekutu. Jepang dipandang

---

<sup>28</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 370.

sebagai kekuatan militer yang potensial mengancam wilayah Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda.

Angkatan laut Hindia Belanda (*Koninklijke Marine*) berada dalam kondisi yang lemah. Armada yang ada sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tua yang tidak memadai untuk menghadapi kekuatan modern seperti Jepang. Pelabuhan strategis seperti Surabaya dan Batavia difungsikan sebagai pusat logistik dan pertahanan maritim. Namun, pemerintah kolonial menyadari bahwa kemampuan pertahanan laut mereka sangat terbatas. Fokus utama angkatan laut pada masa ini adalah menjaga netralitas Belanda dengan mengawasi jalur perdagangan dan mencegah penyelundupan senjata ke pihak-pihak yang bertikai.<sup>129</sup>

Di sisi lain, peran masyarakat pribumi dalam sistem kolonial tetap terbatas. Ketidakadilan sosial, khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, semakin terlihat selama masa perang. Diskusi mengenai pembentukan milisi pribumi (*Indische Weerbaar*) muncul sebagai salah satu respons terhadap ancaman eksternal. Ide ini menandai awal keterlibatan pribumi dalam sistem militer kolonial, meski masih berada dalam kendali penuh pemerintah Belanda.<sup>30</sup>

Pada tahun 1913, Gagasan pembentukan milisi pribumi telah dipertimbangkan, dan ditolak oleh pemerintah saat itu. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran akan

---

<sup>29</sup> Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War, 1914–1918* (Leiden: KITLV Press, 2007), hlm. 381–382.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 427.

kekuatan Jepang yang semakin dominan setelah kemenangan mereka atas Rusia pada tahun 1905. Akan tetapi, dengan pecahnya perang pada 1 Agustus 1914 gagasan mengenai pembentukan milisi pribumi mulai dibicarakan lagi sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan wilayah Hindia Belanda.<sup>31</sup> Namun, gagasan ini memicu perdebatan di kalangan pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Sementara pihak kolonial melihatnya sebagai cara praktis untuk memperkuat pertahanan, sebagian masyarakat pribumi mencurigai motif di balik kebijakan tersebut. Perekrutan milisi dianggap tidak memberikan keuntungan nyata bagi pribumi, terutama karena tidak ada jaminan atas hak politik atau ekonomi yang lebih baik.<sup>32</sup>

Dalam upaya merekrut masyarakat pribumi ke dalam milisi, pemerintah kolonial menghadapi tantangan besar. Mayoritas penduduk pribumi enggan terlibat dalam struktur militer yang mereka pandang sebagai perpanjangan kolonialisme. Namun, ada juga tokoh nasionalis moderat yang melihat peluang dalam pembentukan milisi ini. Organisasi seperti Boedi Oetomo, misalnya, mendukung gagasan milisi dengan harapan bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi pendidikan militer dan hak politik bagi pribumi. Tokoh-tokoh nasionalis lainnya, terutama dari kalangan radikal,

---

<sup>31</sup> Ricklefs, (2008), hlm. 371.

<sup>32</sup> Hafidz Kuncoro Jati et al., “Pengaruh Perang Dunia I terhadap Pembentukan Kebijakan Pertahanan Nasional Indonesia,” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (2023): 72–74.

justro menentang kebijakan ini karena dianggap hanya sebagai alat eksploitasi tanpa memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat pribumi.<sup>33</sup>

Pemerintah kolonial berusaha menggambarkan *Indische Weerbaar* sebagai langkah yang akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Namun, resistensi dari masyarakat pribumi terus meningkat. Banyak yang merasa bahwa milisi ini hanya digunakan untuk melindungi kepentingan kolonial tanpa mempertimbangkan kebutuhan pribumi. Meski demikian, gagasan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah interaksi militer antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Pengalaman ini, meskipun terbatas, menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda pribumi.<sup>34</sup>

Dalam konteks ekonomi, Hindia Belanda sangat bergantung pada jalur perdagangan internasional yang menjadi terganggu akibat perang. Pelayaran yang terganggu menyebabkan pasokan barang menjadi terbatas, terutama barang-barang yang diimpor dari Eropa. Inflasi yang melanda membuat harga kebutuhan pokok melonjak, menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal. Terlebih lagi, Belanda yang harus meningkatkan anggaran militernya di Eropa juga berdampak pada Hindia Belanda, dengan dialihkannya dana dari program kesejahteraan ke anggaran militer.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 74.

<sup>34</sup> Petra Groen, "The Invasion of the Dutch East Indies: An Impressive Japanese Source," *International Journal of Military History and Historiography*, Vol. 36, No. 1 (2016): hlm. 49–52.

<sup>35</sup> Susanne Wolf (2013), hlm. 25-26.

Krisis ekonomi ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dan menyulut emosi nasionalisme yang terus berkembang.

Selain dampak ekonomi, perang juga memperkuat pengawasan kolonial terhadap aktivitas politik pribumi. Pemerintah kolonial khawatir bahwa keresahan sosial dapat dimanfaatkan oleh kelompok nasionalis untuk menantang otoritas mereka. Kebijakan sensor dan pengawasan ketat diberlakukan untuk mencegah penyebaran ide-ide radikal. Namun, langkah-langkah ini justru mendorong lebih banyak diskusi di bawah tanah tentang pentingnya solidaritas dan perjuangan politik di kalangan pemuda pribumi.<sup>36</sup>

Pada tahun 1918, Hindia Belanda menghadapi krisis yang semakin parah. Kelangkaan pangan, keresahan buruh, dan tekanan sosial membuat pemerintah kolonial berada dalam situasi sulit. Ketegangan semakin meningkat ketika gerakan protes mulai muncul di berbagai wilayah. Dalam upaya meredakan situasi, pemerintah kolonial memberikan janji reformasi, termasuk perbaikan kondisi kerja, pendidikan, dan perluasan partisipasi politik bagi pribumi. Namun, sebagian besar janji ini hanya bersifat sementara dan tidak sepenuhnya terealisasi setelah perang berakhir.<sup>37</sup>

Periode ini juga memperlihatkan pergeseran besar dalam kesadaran masyarakat pribumi. Ide-ide nasionalisme yang sebelumnya terbatas pada elite intelektual mulai

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 310.

<sup>37</sup> Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War*, hlm. 243.

menyebarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan pribumi dalam diskusi politik dan militer, meskipun terbatas, menjadi dasar bagi perkembangan gerakan nasionalis di masa mendatang.<sup>38</sup>

Perang Dunia Pertama menjadi awal perubahan besar dalam hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Kebijakan-kebijakan seperti pembentukan milisi pribumi menunjukkan bahwa pemerintah mulai mempertimbangkan peran pribumi dalam pertahanan kolonial, meskipun resistensi dari masyarakat pribumi tetap kuat. Pengalaman ini menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme yang lebih luas di Hindia Belanda.

Perubahan besar dalam kebijakan dan dinamika sosial di Hindia Belanda selama Perang Dunia Pertama akhirnya membuka jalan bagi inisiatif pendidikan maritim seperti pendirian *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* di Makassar. Bab berikutnya akan membahas lebih lanjut tentang proses pendirian sekolah ini sebagai bagian dari strategi kolonial di Hindia Belanda.

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 310.